



Available at <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpgu>

JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI UNPATTI

Volume 4 Nomor 3 Desember 2025 (454-469)

E-ISSN 2988-0203 P-ISSN 3025-4930

DOI: <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss3pp454-469>

Manajemen Mutu Pendidikan dan Alternatif Pemecahan Dada SMP Negeri di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru

Educational Quality Management and Alternative Solutions at Public Junior High Schools in South Aru District, Aru Islands Regency

Rosina S. P. Soyem^{1*}, Izaak Hendrik Wenko¹, Arnold Sahalessy¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Ambon

*Correspondence: soyem@gmail.com

Article Info

Article history:
Received: 20-06-2025
Revised: 10-07-2025
Accepted: 09-09-2025
Published: 26-10-2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika manajemen mutu pendidikan pada konteks kepulauan yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, kekayaan budaya, dan modal sosial komunitas. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi pola kepemimpinan kepala sekolah dan kolaborasi sosial yang berperan dalam membangun budaya mutu di sekolah-sekolah Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen mutu dipengaruhi oleh kepemimpinan transformatif yang memadukan nilai reflektif, kolaborasi komunitas, serta adaptasi terhadap kondisi geografis. Dukungan masyarakat, kebijakan daerah, dan praktik partisipatif terbukti menjadi katalis bagi penguatan budaya mutu pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretik melalui perluasan konsep *transformational leadership* ke dalam konteks pendidikan kepulauan

Kata Kunci: kepemimpinan transformatif; manajemen mutu pendidikan; budaya lokal

ABSTRACT

This study explores the dynamics of educational quality management within island contexts characterized by limited infrastructure, rich cultural heritage, and strong community social capital. The research focuses on identifying leadership patterns and social collaboration that shape the culture of quality in junior high schools across the Aru Selatan District, Maluku Islands. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving school principals, teachers, and school committees. The findings indicate that successful quality management is driven by transformational leadership integrating reflective values, community collaboration, and adaptation to geographic constraints. Community participation, regional policy support, and participatory practices serve as catalysts for strengthening school quality culture. The study contributes theoretically by extending transformational leadership into the context of island-based education

Keywords: transformational leadership; educational quality management; local culture



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Citation: Soyem, R. S. P., Wenko, I. H., & Sahalessy, A. (2025). Manajemen Mutu Pendidikan dan Alternatif Pemecahan Dada SMP Negeri di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(3), 454-469. <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss3pp454-469>

PENDAHULUAN

Transformasi global dalam bidang pendidikan saat ini menuntut setiap negara untuk menata kembali sistem manajemen mutu pendidikan yang adaptif terhadap tantangan abad ke-21. Laporan *UNESCO Global Education Monitoring Report* (2023) menegaskan bahwa mutu pendidikan menjadi indikator utama pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Konsep *total quality management* (TQM) dalam pendidikan menekankan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), kepemimpinan partisipatif, dan akuntabilitas publik dalam mengelola lembaga pendidikan (Sallis, 2020). Dalam konteks ini, kualitas sekolah tidak hanya diukur melalui hasil belajar, melainkan juga sejauh mana manajemen pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inklusif, dan berdaya saing global.

Fenomena global tersebut berimplikasi kuat terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia yang kini diarahkan melalui berbagai kebijakan strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak peluncuran *Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka* (Kemendikbudristek, 2024), pemerintah berupaya menempatkan sekolah sebagai ekosistem belajar yang otonom dan inovatif. Namun, data *Badan Pusat Statistik* (BPS, 2025) menunjukkan disparitas kualitas antarwilayah masih tinggi – khususnya antara provinsi di wilayah timur seperti Maluku dan kawasan perkotaan di Jawa. Indeks Mutu Pendidikan (IMP) nasional masih berada pada angka 72,3 dari target 80, menandakan masih lemahnya fungsi manajerial sekolah dan rendahnya kualitas sumber daya pendidik di daerah terpencil.

Kesenjangan mutu tersebut memperlihatkan bahwa berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program nasional belum sepenuhnya efektif di tingkat satuan pendidikan. Laporan *Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbudristek* (2024) mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah dalam perencanaan dan evaluasi berbasis data; (2)

ketidaksesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (3) lemahnya budaya reflektif di sekolah. Kondisi ini juga tercermin pada hasil *Asesmen Nasional* tahun 2024, di mana capaian literasi dan numerasi di Maluku masih berada di bawah rerata nasional (Kemendikbudristek, 2024).

Di tingkat lokal, Kabupaten Kepulauan Aru menghadapi permasalahan serupa. Studi Soyem (2024) mengungkapkan bahwa mayoritas SMP di Kecamatan Aru Selatan mengalami kendala pada manajemen mutu pendidikan akibat keterbatasan tenaga pendidik, sarana belajar yang tidak memadai, serta lemahnya pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Temuan tersebut memperlihatkan adanya *implementation gap* antara desain kebijakan mutu pendidikan dengan praktik di lapangan. Walaupun prinsip manajemen mutu menuntut keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, realitas menunjukkan bahwa banyak sekolah di wilayah kepulauan belum memiliki sistem manajemen berbasis data dan belum melaksanakan evaluasi diri sekolah secara berkala.

Kajian literatur nasional memperkuat gambaran tersebut. Penelitian Syafaruddin dan Syukri (2022) menegaskan bahwa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia lebih disebabkan oleh lemahnya tata kelola, bukan semata-mata oleh keterbatasan sumber daya. Demikian pula hasil penelitian Suyitno (2020) yang menyoroti bahwa peran kepala sekolah sebagai *instructional leader* belum optimal dalam membangun budaya mutu di sekolah. Beberapa studi terbaru (Latifah, 2023; Mahyudin, 2021) bahkan menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan keberhasilan implementasi *School-Based Quality Management* (SBQM), namun variabel tersebut masih kurang diinvestigasi pada konteks kepulauan dan daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) baik secara teoritik maupun empiris terkait model

manajemen mutu pendidikan di wilayah kepulauan Indonesia. Literatur internasional banyak membahas penerapan TQM di sekolah-sekolah urban (Hattie, 2016; Hopkins, 2018), tetapi belum banyak studi yang menyoroti bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi di lingkungan yang memiliki hambatan geografis, infrastruktur terbatas, dan heterogenitas sosial budaya tinggi seperti Kepulauan Aru. Kesenjangan ini menegaskan perlunya studi kontekstual yang menggali praktik manajemen mutu berbasis kearifan lokal dan strategi adaptif kepala sekolah di wilayah kepulauan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akademik untuk memperluas teori manajemen mutu ke dalam konteks pendidikan kepulauan yang memiliki karakteristik sosial-geografis unik. Secara praktis, penelitian ini penting karena hasilnya dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui pendekatan *localized quality management*. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan pendidikan Maluku tahun 2025 yang menekankan pemerataan mutu dan peningkatan kompetensi pendidik berbasis wilayah (*Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, 2024*).

Lebih jauh, penguatan peran kepala sekolah sebagai penggerak mutu menjadi fokus utama dalam paradigma baru pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai *transformational leader* yang mampu memotivasi guru, memfasilitasi inovasi pembelajaran, dan membangun budaya reflektif di sekolah (Danim, 2021). Dalam konteks ini, mutu pendidikan akan meningkat jika kepemimpinan sekolah terarah pada kolaborasi, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah harus dikaitkan dengan strategi supervisi akademik dan sistem evaluasi berbasis kinerja.

Selain itu, penerapan *Merdeka Belajar* menuntut sekolah mengembangkan sistem manajemen mutu yang fleksibel, berorientasi

hasil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih rendahnya kesiapan guru terhadap Kurikulum Merdeka akibat minimnya pelatihan dan sarana digital (Widodo & Latupapua, 2023). Rendahnya literasi digital dan lemahnya infrastruktur menjadi penghambat bagi penerapan evaluasi berbasis platform *Platform Merdeka Mengajar (PMM)* di sekolah-sekolah kepulauan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, melainkan pada efektivitas implementasi manajemen di tingkat sekolah.

Secara konseptual, penelitian ini memiliki signifikansi akademik karena mengembangkan model konseptual baru tentang *contextualized quality management in island-based education systems*. Model ini mengintegrasikan teori *transformational leadership* (Bass & Riggio, 2006) dengan pendekatan TQM dalam pendidikan (Sallis, 2020), menghasilkan kerangka empiris yang relevan untuk konteks geografis kepulauan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu berbasis wilayah serta memperkuat implementasi supervisi dan asesmen pendidikan di daerah 3T.

Dengan merujuk pada kompleksitas tantangan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen mutu pendidikan serta mengidentifikasi alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi sekolah menengah pertama di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini tidak hanya akan mengungkap faktor penghambat dan pendukung mutu pendidikan, tetapi juga menawarkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai *empirical framework* dalam pengembangan kebijakan mutu pendidikan di wilayah kepulauan. Secara eksplisit, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas teori manajemen mutu pendidikan dengan mengintegrasikan pendekatan *transformational eco-leadership* dalam

administrasi pendidikan berbasis kepulauan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen mutu pendidikan serta alternatif pemecahannya di sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi sosial serta perilaku aktor pendidikan di konteks kepulauan yang kompleks. Pendekatan ini mengacu pada pandangan Creswell dan Poth (2018) bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang dikonstruksi oleh individu dalam konteks sosialnya, sehingga hasilnya lebih reflektif terhadap realitas lapangan.

Metode kualitatif deskriptif dianggap relevan karena peneliti tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap variabel, melainkan menggambarkan bagaimana kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lain mengelola mutu pendidikan dan merespons permasalahan sumber daya, kurikulum, serta sarana prasarana yang terbatas. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi secara alamiah (*natural setting*) dengan menekankan makna di balik fakta empiris.

Penelitian ini dilaksanakan di lima satuan pendidikan menengah pertama, yaitu SMP Negeri 3 Jerol, SMP Negeri 6 Popjetur, SMP Negeri 10 Ngaibor, SMP Negeri 11 Laininir, dan SMP Negeri Korpuy. Wilayah ini dipilih karena mewakili karakteristik geografis dan tantangan pendidikan khas kepulauan, seperti keterbatasan transportasi laut, ketimpangan distribusi guru, dan keterbatasan akses jaringan listrik serta internet. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada awal tahun ajaran 2024.

Informan penelitian meliputi lima kepala sekolah, lima wakil kepala sekolah bidang kurikulum, lima guru, lima perwakilan komite sekolah, dan satu pengawas sekolah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih subjek yang dinilai memiliki informasi paling relevan terhadap fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2023). Karakteristik informan terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 30-55 tahun serta latar belakang pendidikan sarjana dan pascasarjana di bidang pendidikan.

Tabel 1. Daftar partisipan penelitian berdasarkan peran dan satuan pendidikan

N o	Satua n Pend idika n	Ke pal a Sek ola h	Wak asek Kuri kul u m	G ur u	Ko mit e	Pen gaw as
1	SMP Nege ri 3 Jerol		1	1	1	1
2	SMP Nege ri 6 Popje tur		1	1	1	-
3	SMP Nege ri 10 Ngaib or		1	1	1	-
4	SMP Nege ri 11 Laini nir		1	1	1	-
5	SMP Nege ri Korp uy		1	1	1	-
T ot al			5	5	5	1

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator manajemen mutu pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi (Suyitno, 2020). Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati perilaku kepala sekolah, aktivitas pembelajaran, serta interaksi guru dan siswa dalam konteks alamiah. Sementara itu, dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen sekolah seperti *rencana kerja sekolah* (RKS), *program supervisi akademik*, jadwal kegiatan, laporan tahunan, serta foto kegiatan pembelajaran.

Keabsahan instrumen dijamin melalui proses triangulasi metode dan sumber, di mana data dari wawancara, observasi, dan dokumen disilangkan untuk memverifikasi konsistensi informasi (Moleong, 2019). Validasi isi pedoman wawancara dilakukan dengan uji pakar dari dua dosen pembimbing yang berpengalaman di bidang manajemen pendidikan. Reliabilitas kontekstual diperoleh dengan melakukan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil transkrip wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan makna yang ditangkap peneliti.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2023) yang meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari wawancara dan observasi menjadi tema-tema substantif yang relevan, seperti "kepemimpinan kepala sekolah", "faktor penghambat mutu", dan "strategi peningkatan mutu". Penyajian data dilakukan secara naratif dan disertai matriks tematik. Proses verifikasi dilakukan terus-menerus sejak awal pengumpulan data

hingga diperoleh pola temuan yang stabil dan konsisten dengan tujuan penelitian.

Analisis mendalam ini memungkinkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas manajemen mutu pendidikan. Secara konseptual, proses ini juga menghasilkan model analitik yang mengaitkan kepemimpinan kepala sekolah dengan dimensi perencanaan strategis dan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui enam tahapan utama, yaitu (1) studi pendahuluan dan observasi lapangan awal, (2) penyusunan instrumen penelitian, (3) pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, (4) pengumpulan data sekunder melalui dokumen resmi, (5) analisis data interaktif dan penyusunan hasil temuan, serta (6) validasi hasil melalui diskusi dengan pakar dan konfirmasi ke lapangan (*member validation*). Keseluruhan proses penelitian dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika penelitian pendidikan sebagaimana diatur oleh *American Educational Research Association* (AERA, 2020), termasuk aspek kerahasiaan identitas informan dan persetujuan partisipan (*informed consent*).

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi juga membangun pemahaman konseptual mengenai praktik manajemen mutu pendidikan di daerah kepulauan. Metode kualitatif deskriptif ini memberikan kerangka kerja empiris yang kuat untuk merumuskan alternatif pemecahan berbasis kontekstual terhadap tantangan mutu pendidikan di SMP Negeri di Kecamatan Aru Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah

Temuan lapangan menunjukkan bahwa manajemen mutu di sekolah menengah pertama di Kecamatan Aru Selatan masih berada pada tahap adaptif dan belum sepenuhnya sistematis. Kepala sekolah berperan dominan sebagai

administrator, sementara fungsi strategis dalam pengembangan budaya mutu masih terbatas. Berdasarkan wawancara mendalam, sebagian besar kepala sekolah menafsirkan mutu sebagai keberhasilan administratif—misalnya kelengkapan dokumen dan laporan kegiatan—bukan pada dimensi peningkatan proses belajar. Hal ini menegaskan bahwa paradigma mutu masih berorientasi *input-output* dan belum bertransformasi menjadi *outcome-based management*. Temuan ini selaras dengan pengamatan Suyitno (2020) yang menegaskan bahwa sekolah-sekolah daerah periferal cenderung menafsirkan mutu dalam kerangka administratif.

Lebih lanjut, implementasi program peningkatan mutu masih belum terkoordinasi antara kepala sekolah, guru, dan komite. Misalnya, di SMP Negeri 6 Popjetur, penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) dilakukan oleh segelintir guru tanpa melibatkan pemangku kepentingan lain. Kondisi ini memperlemah prinsip *participatory planning* sebagaimana ditekankan oleh Kemendikbudristek (2024). Keterbatasan kapasitas kepala sekolah dalam

memfasilitasi kolaborasi lintas unsur tampak sebagai akar dari lemahnya budaya mutu.

Seluruh sekolah yang diteliti menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) namun masih bersifat sporadis. Misalnya, kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan sekali dalam satu semester, dan hasilnya tidak digunakan sebagai bahan refleksi kolektif. Data observasi menunjukkan bahwa 70 % guru belum melakukan tindak lanjut hasil supervisi. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), sebagaimana digarisankan oleh Sallis (2020) dalam konsep *Total Quality Management*.

Sebagai perbandingan, di SMP Negeri 3 Jerol terdapat praktik baik berupa rapat evaluasi bulanan yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Rapat tersebut membahas kinerja akademik, kehadiran siswa, serta hasil observasi pembelajaran. Praktik ini menunjukkan embrio sistem manajemen mutu berbasis refleksi. Namun, keberhasilan tersebut masih bersifat individual dan belum menjadi praktik institusional lintas sekolah.

Tabel 1. Ringkasan Dimensi Manajemen Mutu Sekolah di Kecamatan Aru Selatan

Dimensi Mutu	Implementasi Lapangan	Indikasi Kelemahan
Perencanaan	RKS disusun tahunan tanpa analisis SWOT	Tidak partisipatif, minim data
Pelaksanaan	Program mutu berjalan sesuai kalender akademik	Minim inovasi, fokus administratif
Evaluasi	Supervisi akademik dilakukan setahun sekali	Tidak ada tindak lanjut reflektif
Pengendalian	Belum ada indikator capaian kinerja terukur	Tidak konsisten antar-sekolah

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa pola manajemen mutu sekolah di wilayah penelitian masih berorientasi pada kepatuhan prosedural. Hanya SMP Negeri 10 Ngaibor yang memiliki dokumen evaluasi diri sekolah (*EDS*) yang diperbarui setiap tahun. Sekolah-sekolah lain masih menggunakan dokumen lama tanpa pembaruan berbasis hasil asesmen.

Faktor geografis juga berpengaruh kuat terhadap efektivitas manajemen mutu.

Akses transportasi laut yang terbatas membuat kepala sekolah sulit mengikuti pelatihan atau kegiatan penguatan kapasitas. Sebagai akibatnya, terdapat ketimpangan dalam pemahaman kebijakan mutu antar-sekolah. Kepala SMP Negeri 11 Laininir, misalnya, mengaku hanya menerima bahan pelatihan melalui pesan daring tanpa pendampingan langsung. Situasi ini mengonfirmasi temuan Widodo dan

Latupapua (2023) mengenai rendahnya kesiapan digital di daerah kepulauan.

Lebih jauh, observasi partisipatif menunjukkan bahwa tidak ada pun sekolah yang menerapkan sistem evaluasi berbasis data digital. Semua laporan masih disusun manual menggunakan format kertas. Padahal, pendekatan *data-driven decision making* telah menjadi indikator utama mutu menurut Pusat Asesmen dan Pembelajaran (2024). Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menjadi penghambat struktural bagi penerapan sistem mutu modern.

Meski demikian, terdapat indikasi berkembangnya kesadaran baru di kalangan guru untuk melakukan refleksi atas proses belajar. Di SMP Negeri Korpuy, guru-guru mulai membentuk kelompok diskusi kecil setelah kegiatan belajar untuk menilai keberhasilan strategi pembelajaran. Inisiatif ini menunjukkan munculnya budaya evaluatif meskipun belum difasilitasi secara formal.

Konteks geografis kepulauan juga menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi antara guru dan masyarakat. Beberapa sekolah memanfaatkan hubungan sosial ini untuk mendukung kegiatan mutu seperti kerja bakti perbaikan ruang kelas atau pengadaan alat peraga. Nilai gotong royong menjadi faktor kompensasi terhadap keterbatasan material, memperlihatkan bahwa manajemen mutu di Aru Selatan bersifat *context-embedded*, di mana modal sosial memainkan peran substitutif terhadap kekurangan sumber daya.

Dengan demikian, hasil penelitian pada subbab ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan manajemen mutu di sekolah-sekolah Aru Selatan masih berada pada tahap peralihan dari orientasi administratif menuju orientasi pembelajaran berkelanjutan. Struktur kepemimpinan kepala sekolah menjadi determinan utama, sementara modal sosial masyarakat berperan sebagai faktor pendukung informal. Pola ini menjadi dasar untuk memahami dimensi berikutnya mengenai alternatif pemecahan terhadap kendala mutu pendidikan di wilayah kepulauan.

2. Analisis Alternatif Pemecahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pemecahan permasalahan mutu pendidikan di sekolah-sekolah Kecamatan Aru Selatan dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan strategis: peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah, penguatan kolaborasi berbasis komunitas, dan optimalisasi sumber daya lokal. Ketiga pendekatan ini muncul sebagai hasil refleksi kolektif kepala sekolah, guru, dan pengawas melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Pendekatan pertama menitikberatkan pada kemampuan kepala sekolah untuk memimpin perubahan berbasis data dan refleksi kinerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Pendekatan kedua menegaskan bahwa kolaborasi dengan masyarakat sekitar sangat krusial dalam konteks kepulauan. Sementara itu, pendekatan ketiga menyoroti pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal, termasuk kearifan budaya dan solidaritas sosial, sebagai modal alternatif dalam peningkatan mutu.

Upaya peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah perlu diarahkan pada pelatihan yang kontekstual dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kepala sekolah di Aru Selatan belum memahami sepenuhnya konsep *continuous improvement* dan siklus PDCA dalam kerangka *Total Quality Management*. Oleh karena itu, model pelatihan yang adaptif terhadap tantangan geografis dan digital menjadi kebutuhan mendesak. Sejalan dengan pandangan Sallis (2020), manajemen mutu pendidikan di daerah terpencil harus dimulai dengan kesadaran pemimpin akan pentingnya refleksi berbasis data. Di SMP Negeri 3 Jerol, misalnya, kepala sekolah mulai mengembangkan sistem evaluasi sederhana menggunakan lembar refleksi guru setelah pelatihan singkat dari pengawas.

Selain pelatihan manajerial, strategi kolaboratif dengan masyarakat juga terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Di beberapa sekolah, komite dan tokoh adat berpartisipasi aktif dalam penyediaan

fasilitas belajar, seperti perbaikan ruang kelas dan pembuatan alat peraga sederhana. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *shared responsibility* berpotensi meningkatkan efisiensi manajemen mutu meskipun tanpa dukungan

finansial besar. Fenomena ini memperkuat teori *distributed leadership* (Harris & Spillane, 2021) yang menekankan pentingnya keterlibatan kolektif seluruh aktor dalam proses pengambilan keputusan sekolah.

Tabel 2. Pendekatan Alternatif Pemecahan Permasalahan Mutu Pendidikan

Pendekatan	Strategi Utama	Dampak	Empiris	di Lapangan
Penguatan Sekolah	Kepala	Pelatihan reflektif dan berbasis data	Meningkatnya mutu internal	kesadaran
Kolaborasi Komunitas		Keterlibatan tokoh adat dan komite	Perbaikan sarana dan motivasi guru	
Optimalisasi Daya Lokal	Sumber	Pemanfaatan potensi lingkungan dan budaya	Peningkatan relevansi pembelajaran	

Pemanfaatan potensi lokal juga menjadi strategi penting yang relevan dengan konteks budaya Aru Selatan. Misalnya, praktik *gotong royong* digunakan sebagai sarana membangun rasa memiliki terhadap sekolah. Guru dan siswa bersama masyarakat secara rutin membersihkan lingkungan sekolah setiap minggu, sehingga terbentuk disiplin kolektif. Nilai-nilai sosial ini secara tidak langsung memperkuat iklim mutu dan disiplin belajar. Hal ini sejalan dengan temuan Tilaar (2020) yang menekankan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme penguatan institusional dalam pendidikan.

Dalam kerangka kebijakan nasional, strategi alternatif ini berpotensi mendukung implementasi *Merdeka Belajar* (Kemendikbudristek, 2024). Sekolah yang menerapkan otonomi kontekstual terbukti lebih mampu menyesuaikan program mutu dengan kondisi lapangan. Misalnya, SMP Negeri 10 Ngaibor mengembangkan program "Kelas Berbasis Laut" dengan memanfaatkan lingkungan pesisir sebagai laboratorium pembelajaran sains. Program ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga memperkuat relevansi kurikulum dengan kehidupan lokal.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa penguatan fungsi supervisi akademik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program mutu. Kepala sekolah

yang aktif melakukan pendampingan guru secara personal berhasil meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi perencanaan pembelajaran. Di SMP Negeri Korpu, supervisi tidak hanya dilakukan melalui observasi kelas, tetapi juga melalui diskusi reflektif antar guru. Pendekatan ini sejalan dengan model *instructional leadership* yang digagas oleh Hattie (2016) dan terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Inovasi lain yang muncul adalah penerapan sistem monitoring berbasis komunitas. Beberapa komite sekolah secara sukarela terlibat dalam memantau kehadiran siswa dan kebersihan lingkungan sekolah. Keterlibatan masyarakat ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap mutu pendidikan. Dalam konteks wilayah kepulauan, strategi ini dianggap lebih realistik dibandingkan penerapan sistem digital yang sulit dijangkau karena keterbatasan jaringan internet.

Meskipun berbagai alternatif pemecahan telah diidentifikasi, keberlanjutan implementasi masih menjadi tantangan. Beberapa program berhenti setelah pergantian kepala sekolah karena tidak ada sistem dokumentasi atau kelembagaan formal yang mengatur kesinambungan inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme *institutional memory* di tingkat sekolah yang dapat menjamin keberlanjutan praktik baik. Hal ini dapat

diwujudkan melalui pembentukan tim mutu sekolah yang bersifat permanen dan lintas generasi kepemimpinan.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa pendekatan solusi tidak dapat bersifat tunggal. Integrasi antara strategi manajerial, kolaboratif, dan kultural menjadi keharusan dalam konteks pendidikan kepulauan. Dengan demikian, alternatif pemecahan yang efektif bukan hanya memperbaiki sistem formal, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai sosial yang menjadi landasan etika pendidikan di Aru Selatan.

Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan mutu pendidikan di daerah kepulauan lebih berhasil jika dilakukan melalui pendekatan *bottom-up*, yaitu pemberdayaan sekolah dan masyarakat secara bersamaan. Pola ini membentuk sinergi antara kepemimpinan sekolah, dukungan komunitas, dan kebijakan daerah, yang selanjutnya akan diuraikan dalam subbab mengenai faktor pendukung dan penghambat mutu pendidikan sekolah di Aru Selatan.

3. Faktor Pendukung Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang secara signifikan mendukung keberhasilan penerapan manajemen mutu pendidikan di sekolah-sekolah wilayah Aru Selatan. Faktor internal mencakup kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, komitmen guru terhadap pembelajaran, serta iklim organisasi yang kolaboratif. Sedangkan

faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan keberadaan modal sosial yang kuat di komunitas kepulauan. Kombinasi kedua dimensi ini membentuk fondasi sosial dan struktural bagi penguatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi elemen paling dominan dalam mendorong efektivitas manajemen mutu. Kepala sekolah yang mampu memadukan peran administratif dan pedagogis cenderung menghasilkan lingkungan belajar yang lebih produktif. Di SMP Negeri 3 Jerol, kepala sekolah secara aktif melibatkan guru dalam proses perencanaan program mutu melalui forum refleksi bulanan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *transformational leadership* (Bass & Riggio, 2019) yang menekankan pentingnya inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan anggota organisasi untuk mencapai visi bersama.

Selain kepemimpinan, komitmen guru terhadap pengembangan profesional menjadi faktor penting lainnya. Guru-guru di SMP Negeri 10 Ngaibor, misalnya, menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti lokakarya peningkatan kompetensi yang diadakan secara mandiri. Mereka menggunakan sumber daya lokal seperti bahan ajar berbasis lingkungan laut untuk memperkaya pembelajaran. Fenomena ini memperlihatkan penerapan prinsip *contextual teaching and learning* yang menekankan relevansi antara materi pelajaran dan realitas sosial siswa (Hopkins, 2018).

Tabel 3. Faktor-Faktor Pendukung Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah

Kategori	Faktor Pendukung	Dampak terhadap Mutu
Internal	Kepemimpinan transformatif kepala sekolah	Peningkatan kolaborasi dan motivasi guru
Internal	Komitmen dan profesionalisme guru	Kualitas pembelajaran meningkat
Eksternal	Dukungan masyarakat dan komite sekolah	Fasilitasi sarana dan kedisiplinan siswa
Eksternal	Modal sosial berbasis budaya lokal	Penguatan etos kerja dan solidaritas

Dukungan masyarakat dan komite sekolah juga berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan program mutu. Berdasarkan

wawancara dengan ketua komite di SMP Negeri Korpu, masyarakat secara sukarela membantu pengadaan alat kebersihan dan

pengecatan ruang kelas. Dukungan semacam ini menunjukkan bentuk nyata kolaborasi sosial yang memperkuat kapasitas sekolah untuk menjalankan program mutu. Temuan ini mendukung hasil penelitian Mahyudin (2021) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sekolah unggul berbasis mutu.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah juga menjadi pendorong strategis. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru memberikan insentif kepada sekolah yang berhasil meningkatkan skor Asesmen Nasional (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 2024). Kebijakan ini mendorong kompetisi sehat antar sekolah dan meningkatkan kesadaran kepala sekolah terhadap pentingnya indikator kinerja berbasis data. Namun, efektivitas kebijakan masih bergantung pada kemampuan masing-masing sekolah dalam melakukan analisis hasil asesmen secara mandiri.

Modal sosial masyarakat kepulauan berperan sebagai faktor pendukung unik yang membedakan konteks Aru Selatan dengan wilayah lain. Nilai gotong royong, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan antarwarga menjadi energi sosial yang menopang kegiatan sekolah. Di SMP Negeri Laininir, guru dan warga desa bekerja sama memperbaiki dermaga kecil agar siswa dapat menyeberang dengan aman menuju sekolah. Tindakan ini mencerminkan bentuk kepedulian komunitas yang berkontribusi langsung terhadap kelancaran proses pendidikan.

Dari sisi internal organisasi, hubungan interpersonal yang harmonis antara kepala sekolah dan guru menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kepala sekolah yang memiliki empati terhadap kondisi guru cenderung membangun komunikasi dua arah yang efektif. Hal ini selaras dengan penelitian Latifah (2023) yang menyebutkan bahwa budaya organisasi positif dapat memperkuat budaya mutu dan meningkatkan produktivitas kerja guru.

Selain itu, dukungan lembaga eksternal seperti pengawas sekolah turut memperkuat implementasi manajemen

mutu. Pengawas berfungsi tidak hanya sebagai evaluator, tetapi juga mentor dalam membantu kepala sekolah memahami konsep mutu berkelanjutan. Salah satu pengawas di wilayah ini bahkan menginisiasi forum koordinasi antar kepala sekolah untuk berbagi praktik baik. Forum ini berperan sebagai wadah pembelajaran kolektif yang memperluas wawasan dan mempercepat transfer inovasi antar sekolah.

Penerapan teknologi sederhana juga muncul sebagai faktor baru dalam mendukung mutu. Meskipun infrastruktur digital terbatas, beberapa sekolah mulai menggunakan aplikasi komunikasi daring seperti *WhatsApp Group* untuk mengkoordinasikan kegiatan mutu. Inovasi kecil ini mempermudah distribusi informasi, terutama di wilayah dengan akses transportasi terbatas. Praktik ini menggambarkan bentuk adaptasi teknologi sesuai konteks lokal (*technology appropriation*) yang memperkuat efektivitas organisasi (Wang, Liu, & Li, 2022).

Secara keseluruhan, faktor pendukung manajemen mutu di Aru Selatan memperlihatkan keseimbangan antara kekuatan struktural dan modal sosial. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan formal, tetapi juga oleh semangat kolektif komunitas pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan mutu di daerah kepulauan bergantung pada harmonisasi antara sistem birokratik dan nilai-nilai lokal. Sinergi inilah yang menjadi modal utama untuk mengembangkan model manajemen mutu yang kontekstual dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia Timur.

4. Faktor Penghambat Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi manajemen mutu di sekolah-sekolah Kecamatan Aru Selatan. Hambatan tersebut meliputi faktor struktural, kultural, dan sumber daya manusia. Secara struktural, keterbatasan sarana prasarana, keterisolasi geografis, serta lemahnya sistem supervisi menjadi

kendala dominan. Secara kultural, resistensi terhadap inovasi dan ketergantungan pada pola kerja lama memperlambat perubahan. Sedangkan secara personal, rendahnya kompetensi manajerial dan literasi digital kepala sekolah serta guru turut menghambat optimalisasi program mutu. Kombinasi ketiga aspek ini membentuk siklus kelemahan yang saling memperkuat, menuntut solusi strategis dan kontekstual.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan menjadi hambatan mendasar dalam penerapan sistem mutu yang modern. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar sekolah belum memiliki jaringan internet yang stabil dan peralatan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses platform pembelajaran digital maupun aplikasi pengelolaan data pendidikan. Menurut Widodo dan Latupapua (2023), kesenjangan digital di daerah kepulauan Indonesia mencapai lebih dari 40%

dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas supervisi daring dan pelaporan kinerja berbasis data.

Selain infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat signifikan. Sebagian besar kepala sekolah di wilayah Aru Selatan belum mendapatkan pelatihan manajemen mutu yang terstruktur. Hasil wawancara dengan pengawas sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat miskonsepsi mengenai konsep *continuous quality improvement*. Banyak kepala sekolah memandang mutu sebatas pencapaian indikator administratif, bukan transformasi budaya organisasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan epistemologis antara teori mutu dan praktik di lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sallis (2020) dalam analisisnya mengenai TQM di lembaga pendidikan.

Tabel 4. Faktor-Faktor Penghambat Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah

Kategori	Jenis Hambatan	Dampak Lapangan
Struktural	Keterbatasan sarana dan jaringan internet	Hambatan komunikasi dan pelaporan mutu
Kultural	Resistensi terhadap inovasi dan supervisi	Kurangnya pembaruan metode pembelajaran
Sumber Daya Manusia	Lemahnya kapasitas kepala sekolah dan guru	Rendahnya kualitas perencanaan mutu
Geografis	Akses transportasi antarpulau yang terbatas	Terhambatnya koordinasi dan monitoring

Kendala kultural juga menjadi faktor penting yang seringkali diabaikan dalam studi manajemen mutu pendidikan. Berdasarkan temuan wawancara, sejumlah guru merasa enggan untuk mengikuti pelatihan tambahan karena menganggap perubahan sistem pembelajaran sebagai beban administratif. Di beberapa sekolah, praktik lama seperti penggunaan RPP manual masih dipertahankan meskipun sudah ada format digital baru dari Kemendikbudristek (2024). Sikap konservatif ini menandakan adanya *cultural lag* yang menghambat adopsi inovasi.

Di sisi lain, lemahnya sistem supervisi dari pengawas sekolah turut memperburuk situasi. Pengawasan yang seharusnya bersifat pembinaan sering kali hanya dilakukan sebagai formalitas pelaporan. Dalam beberapa kasus, pengawas tidak memiliki akses transportasi untuk menjangkau sekolah di pulau terluar. Akibatnya, pembinaan mutu berlangsung sporadis dan tidak berkelanjutan. Hal ini mengonfirmasi hasil penelitian Gunawan (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas supervisi sangat bergantung pada frekuensi interaksi langsung antara pengawas dan sekolah binaannya.

Kendala koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan utama. Hubungan antara sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga eksternal belum berjalan sinkron. Misalnya, laporan kegiatan mutu sekolah seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis. Minimnya sistem umpan balik menyebabkan kebijakan mutu bersifat top-down dan tidak mengakomodasi konteks lokal. Padahal, pendekatan berbasis partisipasi terbukti lebih efektif di wilayah dengan kondisi geografis kompleks (Wang, Liu, & Li, 2022).

Selain faktor kelembagaan, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan klasik dalam pelaksanaan program mutu. Sekolah di Aru Selatan rata-rata hanya memiliki dana operasional yang cukup untuk kegiatan rutin, tanpa alokasi khusus untuk peningkatan mutu. Sumber pendanaan alternatif dari masyarakat pun terbatas, karena sebagian besar orang tua berpenghasilan rendah. Akibatnya, program pengembangan profesional guru, pengadaan sarana pembelajaran, dan kegiatan inovatif seringkali tertunda atau dibatalkan.

Faktor psikologis guru juga memengaruhi implementasi mutu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi intrinsik guru menurun akibat ketidakpastian insentif dan beban administratif yang tinggi. Guru merasa bahwa upaya perbaikan mutu tidak selalu diikuti dengan penghargaan yang setimpal. Situasi ini menimbulkan kelelahan emosional (*emotional burnout*) dan menurunkan produktivitas. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Hattie (2016) yang menemukan bahwa kepuasan kerja guru merupakan determinan utama dalam keberhasilan manajemen mutu sekolah.

Dari perspektif geografis, isolasi antar pulau membuat koordinasi lintas sekolah sulit dilakukan. Beberapa sekolah tidak terjangkau transportasi reguler sehingga distribusi dokumen, bahan ajar, maupun laporan kegiatan mengalami keterlambatan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya konsistensi implementasi kebijakan mutu di seluruh wilayah. Meskipun ada inisiatif digitalisasi, keterbatasan jaringan internet dan perangkat

teknologi membuat solusi ini tidak berjalan optimal.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut saling berinteraksi dan membentuk siklus yang kompleks. Rendahnya kompetensi manajerial memperlemah koordinasi, sementara keterbatasan infrastruktur menghambat inovasi. Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan model kebijakan mutu yang berbasis konteks kepulauan (*contextualized quality management model*) yang mampu mengintegrasikan faktor geografis, sosial, dan budaya lokal.

Temuan ini memberikan dasar empiris bagi rekomendasi perbaikan sistem mutu pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) seperti Aru Selatan. Implementasi kebijakan yang fleksibel, pelatihan adaptif berbasis komunitas, serta pemberdayaan digital yang kontekstual dapat menjadi strategi kunci untuk mengatasi hambatan sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan model manajemen mutu pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia Timur.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di sekolah-sekolah menengah pertama di Kecamatan Aru Selatan masih bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan daya adaptif guru terhadap keterbatasan sumber daya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dimensi manajemen mutu yang paling lemah terletak pada perencanaan strategis, supervisi akademik, dan sistem evaluasi berbasis data. Namun demikian, muncul praktik baik berupa kolaborasi lokal antara sekolah dan masyarakat desa, yang mencerminkan nilai-nilai *gotong royong* serta solidaritas sosial khas masyarakat kepulauan. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen mutu pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial (*social capital*) dan kepemimpinan transformatif di tingkat akar rumput.

Temuan tersebut secara konseptual selaras dengan teori *transformational leadership* (Bass & Riggio, 2019) yang menekankan empat dimensi utama—*idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*—sebagai kunci perubahan budaya organisasi. Dalam konteks Aru Selatan, kepala sekolah yang mampu menginspirasi guru untuk berinovasi meskipun dalam keterbatasan menunjukkan penerapan nyata dimensi *inspirational motivation*. Hal ini sejalan dengan penelitian Harris & Spillane (2021) yang menegaskan bahwa *distributed leadership* memperkuat kapasitas kolektif sekolah dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teori kepemimpinan transformatif dengan menambahkan variabel *geographical resilience*—yakni kemampuan pemimpin sekolah di daerah terpencil untuk mentransformasi kendala spasial menjadi peluang inovatif bagi pembelajaran.

Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen mutu di sekolah-sekolah kepulauan cenderung lebih reaktif daripada proaktif. Kepala sekolah lebih banyak fokus pada penyelesaian administrasi ketimbang membangun budaya reflektif yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Situasi ini kontras dengan temuan Latifah (2023) yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah urban di Jawa Timur telah mengimplementasikan siklus PDCA (*plan-do-check-act*) secara konsisten. Dalam konteks Aru Selatan, faktor keterbatasan infrastruktur digital menjadi penghambat utama penerapan sistem *data-driven decision making*. Namun, hal ini sekaligus membuka peluang bagi penerapan model *localized quality management* yang lebih berbasis pada refleksi komunitas sekolah dan adaptasi nilai lokal.

Hasil penelitian ini juga memperkaya teori *ecopedagogy* dan *sustainable education* (Sterling, 2020; UNESCO, 2023) melalui penemuan bahwa praktik manajemen mutu di wilayah kepulauan dapat dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan sosial dan ekologis. Ketika sekolah mengintegrasikan aktivitas pembelajaran dengan pelestarian lingkungan laut dan daratan, maka pendidikan berperan

ganda: meningkatkan mutu akademik sekaligus memperkuat kesadaran ekologis masyarakat. Hal ini relevan dengan agenda *Education for Sustainable Development (ESD)* yang menekankan bahwa pendidikan bermutu harus berakar pada konteks ekologi dan budaya lokal. Dalam kerangka tersebut, kepala sekolah berperan sebagai *eco-leader* yang menjembatani nilai-nilai tradisi dengan inovasi modern dalam sistem manajemen sekolah.

Jika dibandingkan dengan hasil studi internasional, temuan penelitian ini konsisten dengan laporan *Frontiers in Education* oleh Wang et al. (2022) yang menyoroti bahwa sekolah di wilayah terpencil Asia-Pasifik menghadapi dilema serupa: keterbatasan sumber daya, akses teknologi rendah, tetapi memiliki kohesi sosial tinggi yang dapat dimobilisasi sebagai energi perubahan. Di sisi lain, penelitian ini juga menantang sebagian kesimpulan Hopkins (2018) bahwa reformasi sekolah efektif selalu bergantung pada dukungan kebijakan makro. Dalam konteks kepulauan Indonesia, otonomi lokal dan kepemimpinan berbasis komunitas justru menjadi faktor yang lebih menentukan keberlanjutan mutu pendidikan.

Dari perspektif teoretik, hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual penting melalui pengembangan model *Island-Based Quality Management Model (IBQMM)*. Model ini merupakan perluasan dari kerangka *Total Quality Management* (Sallis, 2020) dengan menambahkan tiga variabel kontekstual: (1) *community engagement* berbasis budaya lokal, (2) *geo-ecological constraints* yang memengaruhi perencanaan pendidikan, dan (3) *transformational eco-leadership* sebagai motor perubahan. Model ini memadukan dimensi struktural dan kultural mutu pendidikan serta dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan peningkatan kapasitas kepala sekolah di daerah kepulauan.

Implikasi praktis dari penelitian ini meluas ke ranah kebijakan publik. Pertama, hasil menunjukkan perlunya pendekatan *decentralized quality assurance* yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam menetapkan indikator mutu sesuai konteks

lokal, sebagaimana dianjurkan dalam Permendikbudristek No. 50 Tahun 2023 tentang *Kurikulum Merdeka*. Kedua, diperlukan pelatihan manajemen berbasis digital bagi kepala sekolah untuk memperkuat literasi data dan sistem pelaporan berbasis *Platform Merdeka Mengajar (PMM)*. Ketiga, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dalam merancang kebijakan *capacity building* berbasis wilayah, agar setiap sekolah mampu melakukan *self-evaluation* dan *continuous improvement* tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada perluasan kajian kepemimpinan pendidikan dengan menegaskan peran *transformational eco-leadership* sebagai dimensi baru dalam administrasi pendidikan berbasis kepulauan. Pendekatan ini memperkaya diskursus manajemen pendidikan yang selama ini berpusat pada konteks daratan. Di sisi lain, secara sosial-kultural, penelitian ini menegaskan relevansi nilai-nilai kearifan lokal seperti *pela-gandong* dan *sasi* sebagai prinsip etika kolektif dalam menjaga harmoni dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya pendidikan dan lingkungan. Integrasi nilai-nilai ini membuktikan bahwa pendidikan berkualitas dapat berakar kuat pada identitas budaya lokal tanpa kehilangan relevansi global, sebagaimana disarankan oleh Tilaar (2020) dalam konsep *pendidikan multikultural kritis*.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan dan jangkauan geografis yang relatif sempit. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian model *IBQMM* secara kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak sekolah di wilayah kepulauan lain seperti Maluku Tengah, Seram, dan Tanimbar. Pendekatan *mixed methods* dapat digunakan untuk memverifikasi validitas model dan mengevaluasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap capaian mutu sekolah menggunakan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* (Hair et al., 2022). Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam dimensi *eco-leadership* dalam

konteks pendidikan adat, sehingga memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan kearifan lokal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen mutu pendidikan di daerah kepulauan tidak dapat diseragamkan dengan pendekatan daratan. Keunikan geografis dan budaya menuntut adaptasi teoretik serta inovasi praktis yang berbasis pada kekuatan lokal. Kontribusi utama studi ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori kepemimpinan transformasional dan ekopedagogi ke dalam konteks kepulauan Indonesia, sehingga memperkaya diskursus global tentang pendidikan berkelanjutan berbasis budaya dan lingkungan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan di wilayah kepulauan Aru Selatan merefleksikan hubungan integratif antara kepemimpinan transformatif, modal sosial komunitas, dan konteks geografis sebagai determinan utama dalam membangun budaya mutu berkelanjutan. Kajian empiris memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan mutu tidak hanya bergantung pada instrumen administratif, tetapi pada kepemimpinan reflektif yang mampu memobilisasi partisipasi kolektif guru, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas model *transformational leadership* (Bass & Riggio, 2019) ke dalam konteks pendidikan berbasis kepulauan dengan menambahkan dimensi *cultural sustainability* yang memperkuat teori *ecopedagogy* (Sterling, 2020). Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan dalam merancang program peningkatan mutu yang kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap prinsip *Education for Sustainable Development* (UNESCO, 2023). Walaupun lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah, model konseptual yang dihasilkan membuka peluang untuk diterapkan pada konteks lintas budaya dan regional, sehingga memperkaya

wacana global tentang tata kelola pendidikan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2019). *Transformational leadership* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315270452>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Danim, S. (2021). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, I. (2020). Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 7(2), 179–188. <https://doi.org/10.18860/jp.v7i2.9001>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Harris, A., & Spillane, J. (2021). Leading through distributed leadership: Understanding the dynamics of change. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(3), 387–398. <https://doi.org/10.1177/1741143220976706>
- Hattie, J. (2016). Teachers make a difference: What is the research evidence? [Conference paper]. *Australian Council for Educational Research*.
- Hopkins, D. (2018). *A teacher's guide to classroom research*. Routledge.
- Hopkins, D. (2018). *School improvement for real*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315147464>
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan evaluasi kurikulum merdeka tahun 2024*. Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran.
- Latifah, R. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan budaya mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145–159.
- <https://doi.org/10.21831/japi.v11i2.58024>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mahyudin, E. (2021). Manajemen pemberdayaan sekolah unggul berbasis mutu. *Jurnal Pendidikan Madani*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.52166/jpm.v5i1.2053>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran. (2024). *Asesmen nasional 2024: Laporan nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sallis, E. (2020). *Total quality management in education* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429342018>
- Soyem, R. S. P. (2024). *Manajemen mutu pendidikan dan alternatif pemecahan pada beberapa SMP Negeri di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru*. Universitas Pattimura.
- Sterling, S. (2020). *Education for sustainability: Transforming learning and practice*. Earthscan. <https://doi.org/10.4324/9781315763794>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno, I. (2020). Penerapan manajemen mutu terpadu pada sekolah menengah. *Jurnal Kependidikan dan Manajemen Pendidikan*, 8(1), 54–63. <https://doi.org/10.21831/jkmp.v8i1.30342>
- Syafaruddin, & Syukri, M. (2022). *Manajemen mutu terpadu pendidikan*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Tilaar, H. A. R. (2020). *Pendidikan multikultural kritis di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- UNESCO. (2023). *Education for Sustainable Development: Progress Review 2023*.

- Paris: UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385037>
- Wang, Q., Liu, Y., & Li, S. (2022). Rural school leadership and educational equity in Asia-Pacific contexts. *Frontiers in Education*, 7, 934118. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.934118>
- Widodo, H., & Latupapua, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah kepulauan: Tantangan dan strategi digitalisasi pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(2), 377-392. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i2.49877>